

KEGIATAN PRAKTIK KERJA MAGANG MAHASISWA ILMU KELAUTAN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA, DI UPT PPP PONDOKDADAP, KAB. MALANG

Qushoyy bin Ahmad Hairuddin¹⁾,
Rani Khansa Fadhilah²⁾, Quanta Nur
Ihza Marhaendra³⁾, Kurnia Akbar
Archa Prasetyo⁴⁾, Anthon
Andrimida⁵⁾ dan Fauzul Zain
Hardiyanto⁶⁾, Andik Isdianto⁷⁾

^{1,2,3,4)} Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan, Universitas
Brawijaya, Malang,
qushoyy@student.ub.ac.id

^{5,6)} Pelayanan Teknis, UPT Pelabuhan
Perikanan Pantai Pondokdadap,
Kabupaten Malang, Indonesia

⁷⁾ Coastal Resilience and Climate
Change Adaptation (CORECT)
Research Group, Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan, Universitas
Brawijaya, Jl. Veteran, Malang

Article history

Received : 14 September 2022

Revised : 24 September 2022

Accepted : 28 September 2022

*Corresponding author

Qushoyy bin Ahmad Hairuddin

Abstrak

Sebuah pelabuhan yang berlokasi di selat sempu dibangun pada 1987. Setelah melalui beberapa pergantian nomenclatur, kini ia sudah mantap dengan nama UPT PPP Pondokdadap. Pelabuhan ini memiliki beberapa seksi, salah satunya adalah Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan dan Tata Kelola. Beberapa tugas seksi ini adalah menerbitkan STBLK dan SPB. Kedua surat tersebut merupakan indikator bahwa dokumen kapal sudah memenuhi kondisi dan legal untuk melakukan pelayaran. Tahapan dalam penerbitan kedua surat tersebut adalah verifikasi berkas kapal perikanan, memasukkan data registrasi keberangkatan ke dalam aplikasi Parasol, dan validasi STBLK dan SPB. Berdasarkan penerbitan STBLK pada bulan Agustus, didapati jumlah tertinggi pada tanggal 23 Agustus 2021 sejumlah 50 kapal dan terendah pada tanggal 11 dan 17 Agustus 2021 sejumlah 0 kapal. Sedangkan pada bulan September, didapati jumlah tertinggi pada tanggal 6 September 2021 sejumlah 41 kapal dan terendah pada tanggal 27 September sejumlah 1 kapal. Berdasarkan data, penerbitan SPB tidak pernah mencapai atau bahkan mendekati jumlah penerbitan STBLK.

Kata Kunci : legal, verifikasi, validasi, dokumen

Abstract

A port located in the Sempu Strait was built in 1987. After going through several nomenclature changes, now it has settled with the name UPT PPP Pondokdadap. This port has several sections, one of which is the Port Technical Services and Governance Section. Some of the tasks of this section are issuing STBLK and SPB. The two documents indicate that the ship's documents have met the conditions and are legal to voyage. The stages in the issuance of the two documents are verification of fishing vessel files, inputting registration data of departure into the Parasol application, and validating STBLK and SPB. Based on the issuance of STBLK in August, it was found that the highest number was on August 23, 2021, with 50 vessels and the lowest was on August 11 and 17, 2021, with 0 vessels. Meanwhile, in September, the highest number was found on September 6, 2021 with 41 vessels and the lowest on September 27 with 1 vessel. Based on the data, the issuance of SPB never reached or even approached near the number of issuance of STBLK.

Keywords : legal, verification, validation, document

PENDAHULUAN

Pelabuhan merupakan sarana yang penting terutama bagi transportasi laut, dengan adanya transportasi ini, jarak tempuh yang dibutuhkan akan terasa lebih cepat, terutama bagi perkembangan ekonomi suatu daerah dimana pusat produksi barang konsumen dapat dipasarkan dengan cepat dan lancar. Selain itu pada bidang ekonomi, pelabuhan membawa dampak positif bagi perkembangan suatu daerah yang terisolir terutama daerah perairan dimana aksesibilitas melalui darat sulit dilakukan dengan baik (Adris.A.Putra & Djalante, 2011). Oleh sebab itu lah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dibangun pada tahun 1987.

PPP Pondokdadap yang terletak di Dusun Sendang Biru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan masuk dalam zona tengah pesisir Kabupaten Malang. Perikanan tangkap pada Pantai Sendang Biru dibatasi secara ketat dan diarahkan pada penangkapan ikan dengan alat tradisional yang ramah lingkungan. Sarana perikanan Pantai Sendang Biru adalah jenis perahu sekoci 15-30 GT, perahu pakisan, dan perahu payang. Pelabuhan Pondokdadap mulai berdiri dan ramai dikunjungi oleh kapal ikan pada tahun 1982, dengan lokasi yang terlindungi dan layak sebagai tempat mendaratkan hasil tangkapan ikan laut selatan. Berdasarkan data produksi ikan di tempat lelang TPI Pondokdadap tahun 2013 jumlahnya mencapai 5.418.749 kg, dengan produksi terbesar pada bulan September 2013 yang mencapai 1.090.758 kg. Potensi sektor perikanan tangkap di kawasan Pondokdadap sangat besar dengan jenis ikan yang dihasilkan yaitu pelagis besar (tuna, pedang, cakalang, tongkol, dan tengiri) dan pelagis kecil (kembung, selar kuning, banyar, rencek, ekor merah, tembang, slengseng, roja, dan teri). Pemasaran merupakan faktor penting bagi

pengembangan usaha penangkapan ikan. Produksi tangkap kapal payangan, kapal sekoci, dan kapal pakisan dilelang pada TPI, sedangkan hasil tangkap kapal jukung langsung dijual di kios-kios ikan segar yang terletak di sebelah barat TPI (Marina et al., 2014). Seiring berjalannya waktu, pembangunan dan peningkatan fasilitas diterapkan dalam pelabuhan ini. Begitu pula dengan status dan nomenklatur nya.

Pada tahun 1992, Pelabuhan Pondokdadap diberi nama Badan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Pondokdadap (SK Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor: 23, 1992). Pada tahun 2004, Pelabuhan Pondokdadap memperoleh status Kelas C atau kelas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) (Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor: 12/MEN/2004, 2004). Selang enam tahun kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur membentuk Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Pondokdadap (Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor: 061/6614/116.01/2010, 2010) yang bertahan selama 2 tahun dan kemudian mengubah nomenklatur menjadi Instalasi Pelabuhan Perikanan Pondokdadap (Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/11829/116.01/2014, 2014). Melalui Peraturan Gubernur, status berubah lagi menjadi UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 115, 2016). Pada tahun 2018, status berubah kembali menjadi UPT PPP Pondokdadap (Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 74, 2018).

Saat ini, UPT PPP Pondokdadap mengusung status eco-fishing port. Konsep eco fishing ports atau pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan bertujuan untuk

menstandarkan pelabuhan perikanan yang sesuai dengan ISO 14001 sehingga produk perikanan secara internasional (standar Uni Eropa) dapat diterima. Penerapan konsep ini dinaungi oleh kerangka kerja sama yang sebelumnya direncanakan akan diaplikasikan kepada enam pelabuhan perikanan di Indonesia, termasuk UPT PPP Pondokdadap. Eco fishing ports dilatarbelakangi oleh ketergantungan manusia terhadap sektor perikanan dan kelautan. Di Indonesia, berbagai sumber daya ikan didaratkan di pelabuhan atau tempat pendaratan ikan. Aspek sosial dan ekonomi serta ekologi disadari merupakan aspek penting pengelolaan pelabuhan perikanan. Inti dari konsep eco fishing port adalah implementasi dari integritas ekologi dan keberlanjutan sumber daya dan lingkungan dari suatu pelabuhan perikanan. Di Eropa sendiri, prioritas standar lingkungan suatu pelabuhan meliputi kualitas udara, tingkat konsumsi energi, tingkat kebisingan, kualitas air, praktek penggalan, manajemen sampah dan limbah, pembangunan pelabuhan terkait ketersediaan lahan, interaksi pelabuhan dengan masyarakat di sekitarnya, limbah atau buangan dari kapal serta perubahan iklim (Purbani & Aisyah, 2017).



Gambar 1. UPT PPP Pondokdadap

UPT PPP Pondokdadap (gambar 1) memiliki berbagai peran penting dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Hal ini seimbang dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas maupun pelayanan yang disediakan UPT PPP Pondokdadap sangat diterima dan dimanfaatkan secara

maksimal oleh nelayan, pengusaha perikanan, dan pelaku kegiatan perikanan lainnya. Selain itu, UPT PPP Pondokdadap sangat terbuka untuk kegiatan praktik kerja magang.

Pengertian magang sendiri menurut beberapa peneliti adalah model penyiapan calon tenaga kerja dengan melatih siswa bekerja dibawah asuhan atau bimbingan secara langsung oleh seorang atau beberapa orang pekerja ahli dalam kurun waktu tertentu, sehingga siswa magang benar-benar dapat melakukan pekerjaan seperti yang diajarkan oleh pembimbingnya (Wijaya, 2019). Praktik kerja magang dapat dijadikan komparasi kesesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dan mengimplementasikan rencana tindakan atas permasalahan yang ada atau terjadi di lapangan (Ayu Adininggar & Wafa, 2016). Praktik kerja magang merupakan sebuah transisi yang dilakukan sebelum beralih dari mahasiswa ke jenjang selanjutnya atau pekerjaan.

METODE

Kegiatan praktik kerja magang dilaksanakan di Seksi Pelaksana Teknis Pelabuhan, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Jalan Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang (gambar 2). Dilaksanakan dari tanggal 3 Agustus hingga 17 September 2021.



Gambar 2. Lokasi Seksi PTP dan Takel UPT PPP Pondokdadap

Untuk melaksanakan praktik kerja magang. Kami melalui beberapa tahap yaitu pra-magang, magang, dan pasca-magang. Pada tahap pra-magang, kami melakukan persiapan berupa berkas-berkas syarat magang. Pertama, kami menyusun proposal praktik kerja magang untuk mengusulkan topik yang akan kami laksanakan selama kegiatan magang. Setelah itu kami harus melakukan vaksinasi sebagai salah satu syarat untuk keluar kota atau perjalanan jauh. Selain vaksinasi, kami juga melakukan rapid-test antigen sebagai salah satu syarat untuk melakukan magang luring di UPT PPP Pondokdadap. Pada tahap magang, kami melakukan banyak kegiatan. Tahap magang diawali dengan pengenalan instansi, pembagian pekerjaan selama di kantor pelayanan, pengambilan data lapang, seminar, pengawasan selat, dan diakhiri dengan pemaparan hasil praktik kerja magang kami. Pada tahap pasca-magang, kami menyusun Laporan Praktik Kerja Magang dan melaksanakan Ujian Praktik Kerja Magang.

Metode yang kami terapkan dalam kegiatan praktik kerja magang adalah metode kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan demikian, hal yang umum dilakukan ia berkuat dengan analisa tematik. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya (Somantri, 2004). Penelitian deskriptif tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek, komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya (Depiyanti, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan STBLK dan SPB

Setiap kapal perikanan memiliki sebuah map yang berisi berkas dan legalitas kapal. Beberapa berkas yang ada di dalamnya adalah Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Usaha Perikanan, Sertifikat Kelaikan, Surat Laik Operasi, Pas Besar, Gross Akte, dan beberapa berkas lainnya. Dalam verifikasi berkas, berkas dalam map tersebut diperiksa kelengkapannya. Kelengkapan yang dimaksud bukan hanya berupa keberadaan berkas, akan tetapi tanggal kadaluarsanya juga diperiksa. Beberapa berkas dalam map memiliki tanggal kadaluarsa dan beberapa map tidak memiliki kadaluarsa. Oleh karena itu dalam verifikasi berkas, berkas yang wajib diperiksa adalah Surat Izin Penangkapan Ikan, Sertifikat Kelaikan, dan Pas Besar yang masing-masing memiliki masa valid satu tahun setelah diterbitkan atau diperpanjang. Selain berkas-berkas tersebut, juga terdapat formulir keberangkatan yang diisi oleh nelayan.

Setelah melakukan verifikasi berkas, data-data yang berada di dalam formulir keberangkatan dimasukkan ke dalam aplikasi Parasol. Di dalam Parasol terdapat beberapa aspek yang harus diisi: Nama kapal, waktu kapal masuk, waktu kapal berangkat, nominal trip, tujuan kapal, wilayah pengelolaan perikanan, daerah penangkapan ikan, nahkoda dan awak kapal, perbekalan kapal, dan catatan untuk pemilik kapal. Nama kapal adalah nama yang diberikan oleh pemilik kapal sebagai identitas kapalnya. Waktu kapal masuk adalah waktu di mana kapal tambat dan melaporkan kepada petugas lapang. Waktu kapal berangkat adalah waktu di mana kapal melaporkan waktu keberangkatan di kantor pelayanan. Nominal trip adalah trip keberapa kapal tersebut berlayar. Tujuan kapal terbagi menjadi dua yaitu daerah penangkapan ikan dan pelabuhan. Wilayah pengelolaan perikanan adalah wilayah tujuan berdasarkan WPPNRI. Perbekalan kapal yang dimaksud berupa oli (liter), solar (liter), es (balok), air tawar (liter), makanan (Rupiah), dan LPG (tabung). Catatan disesuaikan dengan kondisi berkas atau tujuan seperti yang tertera pada tabel 1.

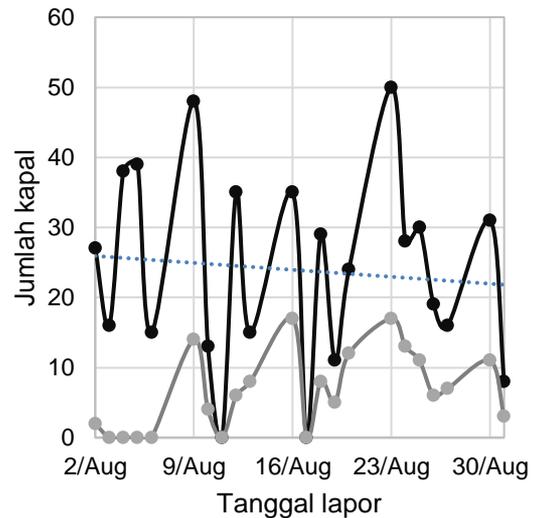
Tabel 1. Catatan berdasarkan kondisi

Kondisi	Isi catatan	Hasil
Berkas lengkap	Dokumen kapal lengkap	STBLK, SPB, logbook dicetak
Berkas dalam proses perpanjangan	Dokumen kapal dalam proses perpanjangan	STBLK dan logbook dicetak
Berkas habis masa berlaku (tidak lama)	Dokumen A habis masa berlaku, harap segera diperpanjang	STBLK dan logbook dicetak
Berkas habis masa berlaku (sudah lama)	-	Surat-surat tidak dicetak dan map ditahan

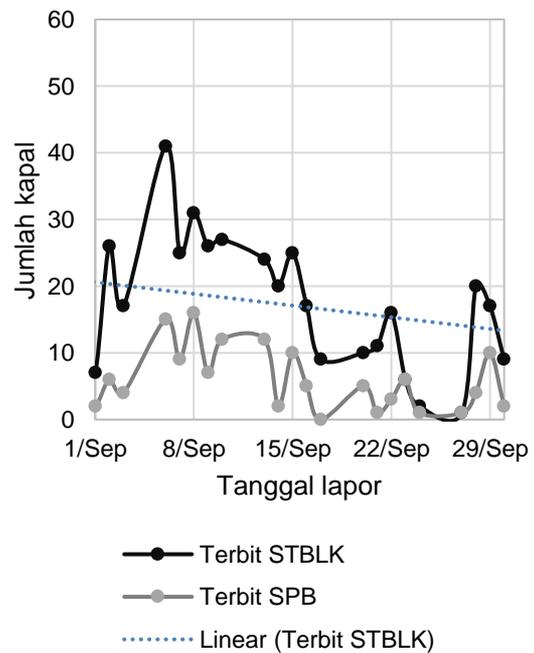
Setelah STBLK dan SPB dicetak, perlu dilakukan validasi. Validasi berfungsi untuk mengesahkan dokumen. Jika STBLK dan SPB tidak divalidasi, maka keberangkatan kapal nelayan dianggap ilegal. Validasi dokumen dibuktikan dengan keberadaan stempel dan tanda tangan petugas syahbandar.

Setelah dilakukan validasi, data jumlah penerbitan STBLK dan SPB diolah dan diinterpretasi untuk laporan bulanan. Hal ini bertujuan untuk evaluasi rutin. Evaluasi sendiri berfungsi untuk mengetahui kendala, masalah, maupun kabar baik yang dialami dalam jangka waktu tertentu. Dalam magang ini penulis hanya akan menginterpretasikan dalam bentuk grafik sederhana. Hal ini termasuk interpretasi tekstual.

Grafik perbandingan antara jumlah kapal lapor dengan jumlah kapal terbit SPB Bulan Agustus 2021



Bulan September 2021



Gambar 3. Grafik jumlah kapal lapor dengan terbit SPB

Berdasarkan grafik (gambar 4) didapati bahwa jumlah penerbitan STBLK tertinggi di bulan Agustus berada di tanggal 23 Agustus 2021 dengan jumlah 50 kapal. Sedangkan jumlah penerbitan STBLK terendah berada

pada tanggal 11 Agustus dan 17 Agustus 2021 dengan jumlah 0 kapal. Didapatkan jumlah laporan 0 pada tanggal 11 dan 17 Agustus 2021 dikarenakan kedua tanggal tersebut merupakan hari penting nasional. Tahun Baru Islam 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 11 Agustus 2021 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021. Dikarenakan adanya hari-hari penting tersebut, kantor pelayanan tidak melayani laporan keberangkatan. Pada bulan September, penerbitan STBLK tertinggi berada pada tanggal 6 September 2021 dengan jumlah 41 kapal. Sedangkan penerbitan terendah berada pada tanggal 27 September 2021 sebanyak 1 kapal. Diketahui pula penerbitan SPB tidak pernah melebihi jumlah penerbitan STBLK. Hal ini dikarenakan banyaknya kapal yang masih belum memenuhi kelengkapan berkas atau dokumen kapal. Berdasarkan grafik di atas, penerbitan Agustus sangat fluktuatif dan tidak menentu. Sedangkan pada bulan September cenderung menurun. Penurunan pada bulan September disebabkan oleh banyaknya kapal dan nelayan yang kembali ke tempat asalnya. Berdasarkan dokumen yang disertakan dalam map, diketahui dominan nelayan berasal dari Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga saat menjelang kuartil 4 tahun 2021, para nelayan memilih untuk kembali ke tempat asalnya.



Gambar 4. Tumpukan map

Ditemukan satu masalah yang kerap sekali dialami dalam penerbitan STBLK dan SPB. Masalah tersebut adalah penumpukan map. Penumpukan map ini menandakan bahwa laporan keberangkatan telah selesai diproses dan telah melewati tahap validasi sehingga map sudah dapat diambil oleh nelayan, operator, maupun pemilik kapal. Akan tetapi sampai map-map tersebut kebanyakan belum

diambil bahkan ketika sudah melewati tanggal keberangkatannya. Dalam beberapa kejadian, nelayan melaporkan keberangkatan akan tetapi map masih di tumpukan. Hal ini berarti nelayan sebelumnya sudah melaut tanpa membawa dokumen dan tidak membayar biaya kebersihan serta tambat labuh kapal.

Pengawasan Selat dan Perawatan Kapal Pengawas Hiu Paus



Gambar 5. Pengawasan Selat Sempu

Selat Sempu adalah tempat berlalu-lalangnya kapal nelayan. Sebagai selat yang sekaligus berstatus sebagai pelabuhan, UPT PPP Pondokdadap diharuskan melakukan pengawasan berkala untuk menjaga keamanan selat (gambar 5). Keamanan yang dimaksud adalah tidak adanya kegiatan ilegal dalam eksploitasi sumber daya perikanan. Kegiatan yang dimaksud adalah IUU fishing dikarenakan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak dilaporkan berkontribusi terhadap eksploitasi berlebihan terhadap stok ikan dan merupakan penghalang bagi pemulihan populasi dan ekosistem ikan (Agnew et al., 2009). Jalur pemantauan diawali dari dermaga, lalu ke arah timur laut, kemudian ke arah barat daya. Hal ni

bertujuan agar eksploitasi sumber daya perikanan berjalan dengan seimbang. Kegiatan pengawasan ini dilakukan di atas Kapal Pengawas Hiu Paus bersama kru kapal dan pengawas.



Gambar 6. Perawatan lambung kapal

Hiu Paus merupakan nama dari sebuah Kapal Pengawas yang ditugaskan di perairan Selat Sempu. Kapal pengawas merupakan kendaraan bermesin. Layaknya kendaraan bermesin lainnya, ia harus dirawat secara berkala. Perawatan yang dilakukan adalah pemeriksaan mesin kapal, pemeriksaan genset, pemeriksaan aki, dan pembersihan lambung kapal dari teritip. Hal ini dilakukan agar kapal dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Kegiatan perawatan kapal dilakukan bersama kru kapal.

Pengukuran Parameter Perairan



Gambar 7. Pengukuran parameter perairan

Parameter perairan perlu diukur secara berkala. Hal ini untuk memenuhi tugas Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sebagaimana tertera dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 Pasal 29 Ayat 3 Poin C: melaksanakan pelayanan informasi penangkapan ikan dan informasi cuaca. Didapatkan hasil suhu pada kisaran 24.3-27.1°C, parameter salinitas berkisar antara 23.5-24.1 ppt, parameter pH berkisar antara 9.03-9.07, dan kecerahan perairan berkisar antara 100-310 cm. Data-data tersebut kemudian diunggah ke Instagram milik UPT PPP Pondokdadap (@infopondokdadap) pada tanggal 14 Agustus 2021.

Seminar Sosialisasi SKPI Menuju Persiapan SCPIB serta Penanganan Sampah di Laut



Gambar 8. Seminar Sosialisasi yang Diselenggarakan oleh AP2HI dan UPT PPP Pondokdadap

Seminar Sosialisasi Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) Menuju Persiapan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) serta Penanganan Sampah di Laut adalah sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perikanan *Pole & Line* dan *Handline* Indonesia (AP2HI) dengan UPT PPP Pondokdadap. Seminar ini diadakan untuk memenuhi kriteria *Fisheries Improvement Program* (FIP) dan AP2HI *Code of Conduct*. Sebanyak 20 peserta seminar yang hadir dari berbagai kalangan yaitu nelayan, Polairud, TNI-AL, perwakilan UPT PPP Pondokdadap, dan penyuplai ikan. Seminar ini terbagi menjadi tiga sesi: 1) Implementasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di UPT PPP Pondokdadap yang disampaikan oleh Bapak Fauzul Zain Hardiyanto, S.Kel. (gambar 8: kedua dari kiri) dari UPT PPP Pondokdadap. 2) Prosedur Penerimaan Bahan Mentah dalam Industri Perikanan yang disampaikan oleh Ibu Lina Chalwati (gambar 13: pertama dari kiri) dari AP2HI. 3) Introduksi Satwa *Endangered, Threatened and Protected* (ETP) dan Penanganan Sampah di Laut oleh Ibu Monica Shintalia, S.Pi. (gambar 8: paling kanan). Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan nelayan yang berada di wilayah UPT PPP Pondokdadap dapat memahami

pentingnya isi dari ketiga sesi tersebut dan menerapkannya dalam waktu yang akan datang agar standar kesegaran ikan meningkat karena kesegaran adalah salah satu atribut terpenting untuk menentukan nilai pasar ikan (García et al., 2017).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan penerbitan STBLK dan SPB adalah jumlah STBLK tertinggi bulan Agustus diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2021 sejumlah 50 kapal. Sedangkan jumlah STBLK terendah diterbitkan pada tanggal 11 dan 17 Agustus 2021 sejumlah 0 kapal. Jumlah STBLK tertinggi bulan September diterbitkan pada tanggal 6 September sejumlah 41 kapal. Sedangkan jumlah STBLK terendah diterbitkan pada tanggal 27 September sejumlah 1 kapal. Menjelang kuartil 4 tahun 2021, laporan keberangkatan menurun jumlahnya. Hal ini dikarenakan nelayan yang kembali ke tempat asalnya (Kab. Sinjai). Masalah yang kerap dialami saat penerbitan STBLK adalah menumpuknya map sehingga pembayaran biaya kebersihan dan tambat labuh terhambat. Selain penerbitan STBLK dan SPB, terdapat kegiatan pengawasan selat dan perawatan kapal pengawas. Kegiatan ini dilakukan di atas salah satu armada kapal pengawas yaitu Kapal Pengawas Hiu Paus. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan selat, terutama dari IUU *fishing*. Perawatan kapal dilakukan agar kapal dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Kegiatan pengukuran parameter dilakukan di sekitar pelabuhan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada nelayan terkait kualitas perairan. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, dilaksanakan juga seminar sosialisasi yang diselenggarakan oleh AP2HI dan UPT PPP Pondokdadap. Terdapat tiga topik utama yang disampaikan: 1) Implementasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di UPT PPP Pondokdadap yang disampaikan oleh Bapak Fauzul Zain Hardiyanto, S.Kel. dari UPT PPP Pondokdadap. 2) Prosedur Penerimaan Bahan Mentah dalam Industri Perikanan yang disampaikan oleh Ibu Lina Chalwati dari AP2HI. 3) Introduksi Satwa

Endangered, Threatened and Protected (ETP) dan Penanganan Sampah di Laut oleh Ibu Monica Shintalia, S.Pi.

UCAPAN TERIMAKASIH



Gambar 9. Dari kiri: Qushoyy bin Ahmad Hairuddin, Quanta Nur Ihza Marhaendra, Bapak Anthon Andrimida, S.Kel., Bapak Fauzul Zain Hardyan, S.Kel., Rani Khansa Fadhillah, dan Kurnia Akbar Archa

Terima kasih kami sampaikan kepada UPT PPP Pondokdadap yang telah menerima kami untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Magang dan menyediakan sarana untuk pengambilan data magang kami. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Anthon Andrimida, S.Kel., Bapak Fauzul Zain Hardyan, S.kel. (gambar 9), serta staf UPT PPP Pondokdadap, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kami dan masa depan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andik Isdianto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing kami yang selalu memberi dukungan penuh dalam kegiatan yang kami jalankan. Terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan moral kepada kami.

DAFTAR PUSTAKA

Adris.A.Putra, & Djalante, S. (2011). Pengembangan Insfratraktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Ilmiah Media Engineering*

Kegiatan Praktik Kerja Magang...., Hairuddin et.al

Vol.6, 6(2), 84–93.

Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2009). Estimating the worldwide extent of illegal fishing. *PLoS ONE*, 4(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004570>

Ayu Adininggar, D., & Wafa, A. (2016). Analisis Permasalahan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 09(1), 11–21.

Depiyanti, O. M. (2014). MODEL PENDIDIKAN KARAKTER DI ISLAMIC FULL DAY SCHOOL (Studi Deskriptif pada SD Cendekia Leadership School, Bandung). *TARBAWY : Indonesian Journal of Islamic Education*, 1(2), 132. <https://doi.org/10.17509/t.v1i2.3769>

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. (1992). Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor: 23.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. (2010). Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor: 061/6614/116.01/2010.

Dinas Perikanan dan Kelautan. (2014). Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/11829/116.01/2014.

García, M. R., Cabo, M. L., Herrera, J. R., Ramilo-Fernández, G., Alonso, A. A., & Balsa-Canto, E. (2017). Smart sensor to predict retail fresh fish quality under ice storage. *Journal of Food Engineering*, 197, 87–97. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2016.11.006>

Gubernur Jawa Timur. (2016). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 115.

Gubernur Jawa Timur. (2018). Nomenklatur,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 74.

Marina, A., Pamungkas, S. T., & Asikin, D. (2014). Pola Spasial Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Sendang Biru Malang. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur*, 2(2).

Purbani, D., & Aisyah. (2017). Konsep Eco Fishing Port Berbasis Kualitas Air Dalam Pengelolaan Pelabuhan : Studi Kasus Ppi Berek Motor, Kabupaten Bintan the. *Jurnal Segara*, 13(1), 25–35.

Somantri, G. R. (2004). Memahami Metode Kualitatif. *Makara*, 9(5), 26.

Wijaya, N. I. (2019). Efektifitas Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) Dalam Mendukung Tujuan Mata Kuliah Kerja Praktik (KP) di Universitas Hang Tuah. *Proceeding Indonesian Carrier Center Network (ICCN) Summit 2019*, 82–89.